DIALOG DEMOKRASI

THE HABIBIE CENTER

DEMOCRACY BRIEF

Resiliensi Demokrasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global dan Pergeseran Geopolitik

Mei 2026

Democracy Brief merupakan publikasi berkala dari The Habibie Center yang menyajikan analisis singkat mengenai perkembangan demokrasi di Indonesia. Publikasi ini disusun berdasarkan rangkaian diskusi berkala dari program Habibie Democracy Forum yaitu Dialog Demokrasi, serta didukung oleh kajian literatur yang relevan, dengan tujuan memperkaya diskursus kebijakan dan mendorong perumusan rekomendasi kebijakan.

The Habibie Center

Institute untuk Demokrasi dan Hak Asasi Manusia

Habibie Democracy Forum - Dialog Demokrasi Program

Pengarah Program:

Mohammad Hasan Ansori

(Direktur Eksekutif)

Ghazali H. Moesa

(Direktur Keuangan dan Administrasi)

Julia Novrita

(Direktur Program dan Pengembangan)

Penulis:

Fullah Jumaynah

Erina Fionita Nurfajila

Annisa Zahra Ramadhani

Reviewer:

Prof. Dr. Firman Noor, M.A (Hons)

(Senior Associate Fellow, The Habibie Center)

Administrasi dan Keuangan:

Asvida Nurlaela

Natassa Irena Agam

Design dan Publikasi:

Firda Safhira

Democracy Brief

Resiliensi Demokrasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global dan Pergeseran Geopolitik

Mei 2026

Democratization Must Go On

LATAR BELAKANG

Sistem demokrasi di seluruh dunia sedang berada di bawah tekanan dengan skala yang luas dan intens. Selama dua dekade berturut-turut sejak 2006, indeks demokrasi global menunjukkan tren penurunan. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai pilar demokrasi pun mengalami guncangan dari dalam: tumbuhnya populisme sayap kanan di Eropa dan Amerika, melemahnya kepercayaan tengah terhadap institusi, serta bangkitnya narasi bahwa demokrasi terlalu lambat dan terlalu mahal di tengah krisis.

Gambar 1. Peta Kebebasan Dunia (*Freedom Map*) Tahun 2025

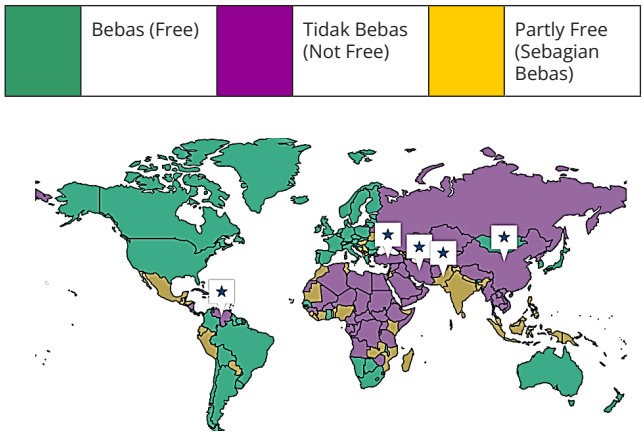

Sumber*: Freedom House, Freedom in the World 2025.*

Tak terkecuali Indonesia, yang mendapat skor 56/100 dalam *global freedom score* yang dibuat oleh *Freedom House* yang berada di posisi *partly free* atau demokrasi terbatas. Indonesia mengalami tekanan dua lapis, yaitu dari dalam negeri dan dari luar negeri. Dari luar, konflik di Timur Tengah dan Ukraina mengganggu rantai pasok energi global, mendorong fluktuasi harga minyak dan pangan yang langsung dirasakan rumah tangga. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok memaksa negara-negara berkembang memilih posisi, atau setidaknya dianggap memilih posisi, di tengah arsitektur geopolitik yang semakin bipolar. Dari dalam, warisan dua dekade reformasi belum menghasilkan institusi demokrasi yang cukup kuat untuk meredam godaan otoritarianisme elektoral.

Situasi tersebut yang kemudian banyak disebut sebagai *democratic backsliding*, sebuah kemunduran demokrasi bertahap bukan keruntuhan secara langsung. Indonesia tidak kebal dari dinamika sistem politik tersebut, karena pada dasarnya sistem politik apapun tidak ada yang terbebas dari tantangan. Dalam Dialog Demokrasi pada 29 April 2026, Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, mengingatkan bahwa tidak ada sistem politik yang bertahan selamanya, Kekaisaran Romawi, Imperium Britania, hingga hegemoni Amerika Serikat sekalipun mengalami pasang surut. Namun ia juga menegaskan bahwa demokrasi tetap merupakan salah satu produk pemikiran rasional manusia yang paling bertahan, dengan akar yang dapat ditelusuri sejak peradaban Athena.

Di balik semua kompleksitas geopolitik dan ekonomi, terdapat satu dilema mendasar dalam menghadapi kondisi krisis, yaitu jalan apa yang harus ditempuh oleh pemerintah Indonesia. Terdapat temuan yang menunjukan bahwa dalam situasi krisis, banyak pemerintah di berbagai belahan dunia cenderung mengutamakan kecepatan respon kebijakan dan stabilitas politik dibandingkan akuntabilitas dan partisipasi. Rezim yang kekuasaannya cenderung terkonsentrasi (*Illiberal* atau hibrida) lebih sering memilih stabilitas di atas akuntabilitas dan partisipasi terutama saat krisis ekonomi ditambah terjadi gejolak geopolitik. Sebagai contoh Turki di bawah Recep Tayyip Erdogan atau Hungaria di bawah Viktor Orban.

Secara proses, demokrasi memang secara inheren lebih lambat karena membutuhkan deliberasi, konsultasi, dan keterbukaan. Di saat krisis, kelambatan itu terasa seperti kemewahan yang sulit dipertahankan saat masyarakat butuh kepastian penanganan cepat. Pengalaman historis menunjukkan bahwa langkah-langkah kebijakan luar biasa (*extraordinary measures*) yang diambil tanpa mekanisme akuntabilitas yang memadai cenderung menghasilkan biaya yang jauh lebih besar dari yang diantisipasi. Mengingat

kembali kebijakan BLBI, skema stabilisasi sektor perbankan senilai Rp 144,5 triliun yang mulai digulirkan pada penghujung 1997, menjadi salah satu ilustrasi paling instruktif dalam hal ini.

Audit BPK terhadap 48 bank penerima menyimpulkan adanya indikasi penyimpangan sebesar Rp 138,4 triliun, atau sekitar 95,5 persen dari total dana yang disalurkan. Penyimpangan ini bukan produk dari terlalu banyaknya deliberasi, melainkan dari absennya pengawasan yang terstruktur pada saat keputusan harus diambil cepat. Respons kelembagaan yang kemudian muncul, termasuk pembentukan BPPN melalui Keppres No. 27 Tahun 1998, justru mengonfirmasi bahwa akuntabilitas bukan hambatan bagi kecepatan penanganan krisis, melainkan prasyarat agar penanganan itu efektif dan tidak meninggalkan beban jangka panjang.

Kini, dinamika krisis ekonomi dan pergeseran geopolitik yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia perlu dielaborasi bagaimana sistem kelembagaan negara meresponnya. Akuntabilitas sebagai fondasi kebijakan yang tahan dan strategis menghadapi krisis harus diperkuat. *Policy note* yang dielaborasi dari Dialog Demokrasi ini berupaya mengidentifikasi titik-titik kerentanan dalam tata kelola demokrasi Indonesia saat ini, sekaligus merumuskan rekomendasi yang dapat memperkuat kapasitas institusional negara dalam menghadapi tekanan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip yang menjadi dasar legitimasinya.

ANALISIS

Erosi Ruang Perbedaan Pendapat dan Paradoks *Check* and *Balance*

Salah satu lembaga negara yang memiliki andil dalam proses deliberasi kebijakan adalah lembaga legislatif. Sistem presidensial yang multipartai menempatkan kebutuhan pembentukan koalisi partai politik di dalam parlemen menjadi tak terhindarkan. Pada dasarnya koalisi besar dalam sistem *majoritarian* dapat menjamin stabilitas pemerintahan, namun keberadaannya menjadi tantangan bagi fungsi pengawasan yang bermakna. Brasil, dalam beberapa periode pemerintahannya, mencatat koalisi kabinet yang melampaui 90 persen kursi legislatif, justru mengidentifikasi kondisi ini sebagai sumber disfungsi tata kelola, bukan keberhasilan.

Di Indonesia, Koalisi KIM Plus saat ini menguasai sekitar 81 persen kursi di DPR RI, dengan hanya satu partai yang berada di luar koalisi pemerintah yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), namun posisinya pun tidak seutuhnya menjadi partai oposisi. Dari sudut pandang manajemen risiko kebijakan, sentralisasi koalisi partai politik di parlemen pada level ini menyimpan potensi kerentanan: tanpa dorongan oposisi yang memadai, mekanisme koreksi terhadap kebijakan yang keliru menjadi lebih lambat dan mahal, baik secara fiskal maupun politis.

Demokrasi direduksi menjadi majoritarianism. Kita berhenti pada *electoral democracy*, tapi tidak melakukan demokrasi yang substantif. (Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar dalam Dialog Demokrasi, 29 April 2026)

Konsekuensinya bersifat konkret. Kebijakan yang dirumuskan tanpa proses deliberasi yang memadai cenderung menghadapi resistensi saat proses implementasi, gugatan hukum, atau kebutuhan revisi yang tidak terencana, sehingga pada akhirnya berimplikasi terhadap efisiensi anggaran dan kepercayaan publik. Kini sistem *check and balance* di Indonesia menghadapi sebuah paradoks demokrasi, mekanisme tetap ada secara formal, namun secara substantif justru melemah. Omnibus Law dan revisi UU KPK menjadi dua kasus yang dapat dijadikan pelajaran dalam konteks ini. Revisi UU KPK di tahun 2019 menjadi sinyal pelemahan terhadap salah satu lembaga negara yang bersifat independen sebagai salah satu instrumen demokrasi.

Gambar 2. Indeks Persepsi Korupsi 2019 - 2025

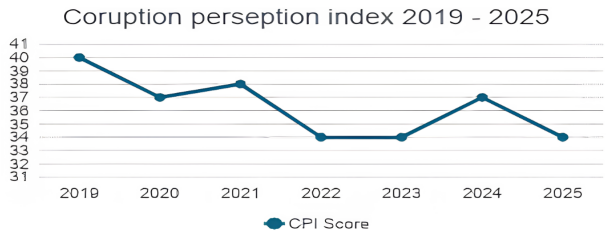

Sumber: Diolah penulis dengan sumber dari transparency.org

Tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga negara menjadi salah satu indikator penting bagi legitimasi sistem demokrasi. Data Indikator Politik Indonesia (Januari, 2026) menunjukkan bahwa DPR RI menempati posisi terendah diantara seluruh lembaga negara yang disurvei, dengan tingkat kepercayaan hanya 56 persen, sebuah pola yang persisten dalam lintas periode pemerintahan. Menurut Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, rendahnya kepercayaan ini mencerminkan kesenjangan antara fungsi representasi yang melekat di DPR RI dengan aspirasi konstituen yang diwakilinya. Secara struktural, hal ini tidak terlepas dari melemahnya fungsi pengawasan legislatif akibat dominasi koalisi besar di parlemen, yang pada gilirannya menggeser posisi DPR RI dari

lembaga yang seharusnya menjalankan *checks and balances*, namun justru menjadi instrumen legitimasi kebijakan eksekutif.

Berbeda dari DPR RI, Mahkamah Konstitusi memberikan pembelajaran kelembagaan yang relevan. Penerapan prinsip *individual judicial accountability*, melalui kewajiban publikasi posisi dan penalaran setiap hakim, termasuk *dissenting opinion*, telah membangun basis kepercayaan publik yang terukur: MK memperoleh kepercayaan 75 persen dalam survei yang sama, unggul 19 poin di atas DPR. Temuan ini mengindikasikan bahwa legitimasi institusional tidak ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan politik, melainkan oleh integritas prosedural dan konsistensi keberpihakan pada kepentingan publik. Independensi kelembagaan, dalam hal ini tidak diposisikan sebagai hambatan efektivitas, keberadaannya justru dijadikan sebagai prasyarat.

Nah Mahkamah Konstitusi kalau teman-teman lihat, sekarang ini menjadi salah satu *guardian of the angel* kita. Makanya keputusan mahkamah konstitusi itu sangat ngeselin DPR, sangat beratin pemerintah, tapi sangat disukai oleh publik. Karena Keputusan-keputusannya "bagus" sesuai publik. (Dr. Mardani Ali Sera dalam Dialog Demokrasi, 29 April 2026)

Pada akhirnya, kualitas demokrasi tidak diukur dari stabilitas koalisi yang terbentuk, melainkan dari seberapa efektif sistem *check and balance* dapat berjalan ketika kebijakan membutuhkan koreksi. Indonesia memiliki kelembagaan demokrasi yang secara formal lengkap, namun tantangan sesungguhnya terletak pada pemulihan substansi dari proses demokratisasi itu sendiri: mengembalikan fungsi pengawasan yang bermakna, memperkuat independensi institusi, dan memastikan bahwa mayoritas parlemen tidak berubah menjadi instrumen legitimasi tanpa proses deliberasi. Pilihan ini bukan semata soal arsitektur kelembagaan, melainkan soal apakah demokrasi Indonesia akan bertumbuh melampaui formalitas prosedur, menuju akuntabilitas yang nyata.

Kerentanan Ekonomi Struktural dan Implikasinya bagi Demokrasi

Tantangan bagi ekonomi domestik di tengah krisis salah satunya berkaitan dengan ekonomi Indonesia yang masih terkonsentrasi pada satu negara mitra, khususnya Tiongkok. Ketergantungan ini menghasilkan dua risiko sistemik, yaitu: kerentanan ekonomi domestik dan tersanderanya kebijakan luar negeri. Data BKPM dan trademap.org (2025) memperlihatkan bahwa Tiongkok mendominasi secara bersamaan di sisi ekspor (23,6% dari total ekspor Indonesia), impor (31,1%) dan investasi, dengan modal Tiongkok dan Hong Kong senilai Rp 290,4 triliun pada 2025, hampir enam kali lipat nilai investasi Jepang. Dominasi ini menembus hampir seluruh sektor strategis, dari mineral hingga pertanian, sekaligus di sisi masuk dan sisi keluar.

Namun, yang menjadi masalah bukan pada kuatnya hubungan antar negara, tetapi pada ketidakseimbangannya. Ketika satu negara mendominasi sekaligus di sisi pembelian, penjualan, dan penanaman modal, maka setiap keputusan ekonomi Indonesia, dari penetapan harga komoditas hingga arah kebijakan luar negeri, mulai mempertimbangkan satu variabel yang sama: bagaimana reaksi Tiongkok. Hirschman (1945) menyebutnya sebagai *the influence effect of trade*, ketergantungan perdagangan yang asimetris bukan sekedar persoalan ekonomi, melainkan instrumen kekuasaan yang bekerja tanpa ancaman eksplisit. Hal ini dapat juga disebut risiko ketergantungan struktural dimana semakin terkonsentrasi ketergantungan, semakin terbatas ruang gerak Indonesia dalam mengambil posisi yang murni berdasarkan kepentingan nasionalnya sendiri.

Kerentanan kedua adalah struktural ekonomi. Selama empat dekade terakhir, kapasitas industri manufaktur Indonesia tidak mengalami transformasi yang berarti. Indonesia masih menjual komoditas mentah dan memberi kembali produk olahan. Posisi Indonesia dalam rantai nilai global tertinggal dari Vietnam dan Thailand di dua dimensi sekaligus, yaitu *backward participation* yang rendah yang disebabkan tidak banyak mengimpor komponen teknologi tinggi untuk diolah dan diekspor kembali. Selain itu juga tertinggal di dimensi *forward participation* yang didominasi pertanian dan pertambangan, porsi tertinggi diantara negara ASEAN.

Agenda hilirisasi yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah belum mengubah posisi ini secara fundamental. Hal ini dapat dilihat dari, lebih dari 75 persen kapasitas smelter nikel dikuasai perusahaan Tiongkok, dengan sekitar 90 persen produknya diekspor kembali ke Tiongkok. Indonesia bergeser dari mengekspor bijih mentah menjadi mengekspor produk olahan satu tahap, tetapi titik-titik bernilai tinggi dalam rantai produksi, yaitu komponen baterai dan desain sistem energi, tetap dikuasai aktor lain.

Pertumbuhan ekonomi yang tidak dirasakan mayoritas warga adalah bahan bakar yang paling mudah terbakar secara politik. Rata-rata pendidikan angkatan kerja Indonesia masih setingkat SMP, lapangan kerja baru dari ekspansi nikel sebagian besar bersifat padat energi dan berisiko tinggi, dan rasio gini Indonesia stagnan

di kisaran 0,38–0,39 selama satu dekade. Hal ini menunjukan adanya surplus dari lonjakan komoditas yang tidak mengalir ke bawah.

Ketika pertumbuhan agregat tidak dirasakan secara merata, wujud dari frustasi publik adalah mencari penjelasan yang sederhana dan mudah diterima. Dalam hal ini, populisme selalu menyediakan jawabannya. Secara empiris, ketimpangan yang persisten berkorelasi kuat dengan meningkatnya dukungan terhadap pemimpin populis, dan populisme adalah jalur paling terdokumentasi menuju erosi demokrasi. Tidak perlu melalui kudeta, melainkan melalui konsolidasi kekuasaan yang berlangsung perlahan: pengikisan lembaga independen, penyempitan ruang oposisi, hingga demokrasi masih tampak utuh dari luar tetapi sudah berongga dari dalam.

Ekonomi, Demokrasi, dan Politik Bebas Aktif

Narasi *trade-off*, bahwa untuk menghadapi krisis ekonomi dan untuk menumbuhkan ekonomi demokrasi harus rela dikompromikan, adalah narasi yang berbahaya. Argumen ini terdengar masuk akal karena sistem otoriter memang bisa bergerak lebih cepat tanpa harus bernegosiasi dengan parlemen atau mendengar kritik publik, tetapi tidak tahan terhadap pemeriksaan empiris. Penelitian Acemoglu, Naidu, Restrepo, dan Robinson (2019) telah menganalisis data 175 negara selama lebih dari setengah abad dan menemukan bahwa demokratisasi secara rata-rata meningkatkan GDP per kapita sebesar 20 persen dalam jangka panjang. Peningkatan tersebut melalui jalur investasi pendidikan, adopsi teknologi, dan perbaikan layanan kesehatan.

Artinya, demokrasi tidak menghambat pertumbuhan. Demokrasi justru mengubah komposisi pertumbuhan menjadi lebih inklusif dan lebih berkelanjutan. Relevansi langsung untuk Indonesia terlihat dalam perbandingan pemulihan krisis 1997–1998. Indonesia dan Korea Selatan sama-sama dihantam krisis keuangan Asia, namun perbedaan kecepatan dan kualitas pemulihan keduanya bukan ditentukan oleh paket kebijakan ekonomi semata, melainkan oleh fondasi legitimasi institusional. Korea Selatan yang sudah melewati demokratisasi di dekade sebelumnya memiliki mekanisme sirkulasi kepemimpinan yang tidak membutuhkan *systemic collapse* sebagai prasyaratnya. Indonesia tidak memiliki itu, dan membayar biaya reformasi yang jauh lebih mahal.

B.J. Habibie pernah memberikan kerangka analisis, jika negara hanya bertumpu pada satu pilar legitimasi yaitu ekonomi ketika krisis datang, maka negara tidak akan mengalami kontraksi biasa justru yang terjadi adalah keruntuhan struktural. Negara yang memiliki *redundancy* berupa pilar politik dan sosial yang kuat justru jauh lebih tahan terhadap guncangan. Dalam konteks geopolitik kontemporer, argumen ini semakin relevan. Era *geoeconomic confrontation*, sebuah era di mana ekonomi menjadi instrumen utama kompetisi antar negara, justru membutuhkan sistem pengambilan keputusan yang akuntabel dan adaptif, bukan sekadar yang cepat.

Pada dasarnya, kebijakan ekonomi yang disusun tanpa proses deliberasi yang memadai lebih mudah dikuasai oleh kepentingan sempit, sehingga kebijakan yang lahir cenderung menguntungkan pihak yang memiliki kedekatan dan koneksi, bukan mereka yang benar-benar memiliki kapabilitas. Dalam konteks ini, prinsip politik luar negeri bebas aktif Indonesia sebenarnya merupakan aset strategis yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Indonesia memiliki posisi yang cukup unik karena mampu menjaga hubungan baik dengan berbagai blok internasional seperti G20, ASEAN, BRICS, *Organisation of Islamic Cooperation*, hingga proses aksesi ke *Organisation for Economic Co-operation and Development*, tanpa sepenuhnya terikat pada salah satu kekuatan tertentu.

Namun, politik bebas aktif yang benar-benar mandiri hanya dapat berjalan apabila ditopang oleh kedaulatan ekonomi yang cukup kuat. Ketika suatu negara terlalu bergantung pada satu mitra dalam perdagangan, investasi, maupun pendanaan, maka kebebasan politik luar negerinya akan terbatas. Karena itu, diversifikasi mitra ekonomi bukan sekadar strategi bisnis, melainkan syarat geopolitik penting agar Indonesia dapat menjalankan politik luar negeri yang benar-benar independen.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis di atas, terdapat lima rumusan rekomendasi yang dapat menjadi perhatian bagi setiap penyelenggara negara sesuai pada tugas dan fungsinya. Ruang deliberasi perlu diperkuat karena merupakan kondisi awal agar kebijakan ekonomi dapat dibuat secara akuntabel. Kebijakan ekonomi yang akuntabel menjadi prasyarat untuk menghasilkan pertumbuhan yang lebih inklusif. Ketika ekonomi tumbuh inklusif, dapat mengurangi tekanan populisme yang mengancam demokrasi dari dalam.

Reformasi Struktur Koalisi, Kembalikan Fungsi Oposisi

Majoritarian dari koalisi yang melebihi dua pertiga kursi parlemen secara struktural telah terbukti melemahkan mekanisme *checks and balances*. Bukan berarti koalisi besar dilarang, namun perlu dipastikan tidak ada tekanan yang berpengaruh bagi partai yang memilih untuk berada di luar koalisi (oposisi). Partai yang memilih jalur oposisi harus tetap dipastikan memiliki akses anggaran kebijakan, hak bertanya dan berpendapat yang dijamin, dan perlindungan dari tekanan administratif. Dalam jangka menengah juga dapat dipertimbangkan revisi mekanisme kepemimpinan fraksi yang saat ini memungkinkan Keputusan partai mengabaikan hasil deliberasi komisi. Agenda ini perlu menjadi perhatian bagi reformasi tata Kelola DPR. Sehubungan dengan itu, partai sebagai aktor politik utama perlu ditingkatkan kualitasnya, termasuk kualitas pelembagaan dan integritas, agar dapat menjalankan fungsi-fungsi demokratiknya dengan seksama.

Perkuat Independensi Institusi Pengawas dan Buka Ruang Deliberasi Legislasi

Independensi KPK dan lembaga pengawasan serta peradilan seperti: Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, Ombudsman, dan PPATK perlu diperkuat dan dikonsolidasikan. Komitmen ini harus dijalankan melalui perubahan struktural: jaminan anggaran independen, proses rekrutmen yang terinsulasi dari tekanan politik, dan mekanisme pertanggungjawaban ke publik, bukan hanya ke eksekutif. Paralel dengan itu, setiap RUU yang berdampak signifikan terhadap hak-hak warga dan tata kelola ekonomi wajib melalui proses konsultasi publik yang terstandarisasi dengan tenggat waktu minimum yang tidak bisa diperpendek atas alasan kedaruratan.

Diversifikasi Mitra Ekonomi sebagai Strategi Geopolitik, Bukan Sekadar Dagang

Mengurangi ketergantungan pada satu mitra ekonomi dominan adalah kepentingan keamanan nasional, bukan hanya kepentingan ekonomi. Pemerintah perlu menetapkan target kuantitatif diversifikasi mitra dagang dan investasi dalam RPJMN, dengan BAPPENAS sebagai orkestrator perencanaan diplomasi ekonomi yang selama ini tidak memiliki penanggung jawab tunggal. Strategi ini mencakup: peningkatan partisipasi dalam rantai nilai regional Asia yang tidak didominasi satu aktor, pengembangan kapasitas negosiasi ekonomi internasional di birokrasi lintas kementerian, dan integrasi dimensi luar negeri dalam perencanaan pembangunan yang saat ini masih hampir seluruhnya berorientasi domestik.

Hilirisasi Berbasis Tata Kelola: Transparansi Kontrak dan Distribusi Manfaat

Ambisi hilirisasi yang menjadi backbone target pertumbuhan 8% pada 2029 hanya akan menghasilkan resiliensi jika manfaatnya terdistribusi secara inklusif dan prosesnya transparan secara tata kelola. Ini berarti diperlukan transparansi penuh atas kontrak investasi asing dalam proyek hilirisasi, mekanisme mandatory technology transfer yang dapat diverifikasi, standar lingkungan dan ketenagakerjaan yang tidak dikompromikan demi kecepatan investasi, dan audit berkala atas dampak distribusi pendapatan di wilayah sumber daya. Hilirisasi tanpa transparansi hanya memindahkan ekstraksi dari komoditas mentah ke rente kontrak.

Investasi Pendidikan sebagai Agenda Keamanan Nasional

Kualitas pendidikan adalah fondasi jangka panjang yang paling determinan bagi ketahanan demokrasi dan transformasi ekonomi. Reformasi yang diperlukan bukan sekadar peningkatan anggaran, melainkan perubahan orientasi: dari sistem yang menghasilkan peserta ujian ke sistem yang menghasilkan warga yang mampu berpikir kritis, beradaptasi, dan berpartisipasi. Secara spesifik: rekrutmen guru perlu menjadi profesi yang kompetitif secara remunerasi dan selektif secara kompetensi; kurikulum SMK perlu diintegrasikan secara dinamis dengan peta kebutuhan industri hilirisasi; dan alokasi transfer ke daerah untuk pendidikan perlu direstrukturisasi agar tidak menciptakan ketimpangan kapasitas yang memperburuk ketimpangan pembangunan antar wilayah.

PENUTUP

Narasi bahwa demokrasi memperlambat dan bahkan menjadi hambatan bagi respon krisis adalah narasi yang tidak berdasar sama sekali. Justru negara yang memilih memperkuat akuntabilitas cenderung lebih tangguh dalam menghadapi guncangan. Indonesia memiliki elemen yang diperlukan untuk menjawab tantangan ini: posisi geopolitik sebagai negara non-blok, agenda pembangunan yang terus digaungkan dan kelembagaan demokrasi yang secara formal telah tersedia. Maka pemulihan substansi menjadi urgensi dengan mengembalikan fungsi pengawasan yang bermakna, memperkuat independensi institusi negara dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat sehingga tidak menjadi bahan bakar populisme.

Melalui konteks dinamika geopolitik yang kian dinamis dan tekanan ekonomi yang belum mereda, lima rekomendasi dalam brief ini bukan agenda jangka panjang yang bisa ditunda. Momentum di saat krisis justru menjadi ujian besar bagi kualitas demokrasi: apakah demokrasi akan menyerah pada godaan sentralisasi dan otokrasi yang menjanjikan kecepatan atau justru membuktikan bahwa akuntabilitas dan ketangguhan adalah satu paket yang tidak bisa dipisahkan. Pada akhirnya, fakta historis menegaskan bahwa meskipun demokrasi bukanlah sistem politik yang sempurna; tapi demokrasi tetaplah sistem yang terbaik dari yang sudah ada dalam Sejarah peradaban manusia. Demokratisasi tak boleh henti.

CATATAN METODOLOGIS DAN PENGEMBANGAN

Brief ini disusun dengan sumber utama dari Dialog Demokrasi yang diselenggarakan The Habibie Center pada 29 April 2026. Dari hasil Dialog Demokrasi penulis menambahkan data dari berbagai sumber literatur.

ACKNOWLEDGEMENT

The Habibie Center, melalui Institut Demokrasi dan HAM yang menaungi program Habibie Democracy Forum – Dialog Demokrasi, menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi sehingga *Democracy Brief* ini dapat diterbitkan. Terima kasih secara khusus kepada Pemerintah Federal Jerman melalui Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia atas dukungannya kepada The Habibie Center dalam kerangka program Dialog Demokrasi dan Habibie Democracy Forum — sebuah program yang dijalankan sebagai upaya bersama dalam memperkuat wacana dan praktik demokrasi di Indonesia, sekaligus mendorong pertukaran pengetahuan antara Indonesia dan Jerman.

Terima kasih kepada Prof. Dr. Firman Noor, M.A (Hons), *Senior Associate Fellow*, atas penelaahan dan masukan kritis terhadap naskah ini, serta kepada tim peneliti Fullah Jumaynah dan Erina Fionita Nurfajila, dan mahasiswa magang Annisa Zahra Ramadhani dari Program Studi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran atas kontribusinya dalam proses penyusunan Democracy Brief.

Penghargaan juga disampaikan kepada para narasumber Dialog Demokrasi (April 2026) bertema *"Resiliensi Demokrasi dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Global dan Pergeseran Geopolitik"*: Wahyu Chandra Kusuma P., M.Hum (Direktur Organisasi Kemasyarakatan, Ditjen Polpum, Kemendagri) selaku pembicara kunci; serta para panelis Dr. Mardani Ali Sera, M.Eng (Anggota Komisi II DPR RI, Fraksi PKS), Arianto Christian Hartono, Ph.D (Kementerian PPN/BAPPENAS), dan Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A (Ketua Dewan Pengurus, The Habibie Center).

Semoga, *Democracy Brief* ini dapat menjadi kontribusi nyata bagi para pengambil kebijakan, akademisi, dan masyarakat sipil dalam memperkuat fondasi demokrasi Indonesia yang lebih akuntabel, inklusif, dan responsif terhadap kepentingan publik.

Tentang The Habibie Center

The Habibie Center didirikan oleh Presiden Republik Indonesia ke-III, Bacharuddin Jusuf Habibie beserta keluarga pada tahun 1999 sebagai organisasi independen, non-pemerintah dan non-profit. The Habibie Center memiliki visi untuk memajukan usaha modernisasi dan demokratisasi di Indonesia yang didasarkan pada moralitas dan integritas budaya serta nilai-nilai agama.

The Habibie Center memiliki misi, yang pertama yakni menciptakan masyarakat demokratis secara kultural dan struktural yang mengakui, menghormati, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta mengkaji dan mengangkat isu-isu perkembangan demokrasi dan hak asasi manusia. Kedua adalah memajukan dan meningkatkan pengelolaan sumber daya manusia dan usaha sosialisasi teknologi.

Tentang Habibie Democracy Forum

Habibie Democracy Forum berakar dari semangat "demokrasi tanpa henti" yang diwariskan oleh Prof. Dr.-Ing B.J. Habibie. Semangat ini didasari keyakinan bahwa Indonesia dapat menjadi alternatif role model demokrasi di dunia, mengingat masyarakatnya yang plural tapi tetap menjunjung tinggi persatuan. Tercatat dalam sejarah bahwa Indonesia telah menemui banyak dinamika sejak berhasil melalui masa transisi demokrasi sejak tahun 1999 hingga saat ini.

Dengan memikul semangat untuk terus menjunjung tinggi demokrasi, The Habibie Center menjadikan Habibie Democracy Forum sebagai wadah yang dirancang untuk memfasilitasi dialog bagi berbagai pihak yang memiliki perhatian terhadap demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia untuk dapat mengumpulkan serta menyatukan pikiran guna memperbaiki kualitas demokrasi. Dengan menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan kolaborasi, Habibie Democracy Forum dapat menjadi wadah yang dapat dengan mudah diakses oleh berbagai segmen masyarakat, termasuk partai politik, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, dan kelompok pemuda untuk mendorong konsolidasi kedepannya.

Habibie Democracy Forum bertujuan untuk mempromosikan, melindungi, dan memperkuat nilai-nilai, institusi, dan praktik demokrasi di Indonesia. Forum ini berfokus pada isu-isu seperti pemerintahan yang demokratis, hak asasi manusia, supremasi hukum, proses pemilu, dan partisipasi masyarakat. Secara khusus, Habibie Democracy Forum bertujuan untuk menjadi ruang demokratis dalam mempromosikan nilai-nilai demokrasi, memperkuat institusi demokrasi, pendidikan kewarganegaraan, menjaga integritas pemilu, dan advokasi kebijakan.

Tentang Dialog Demokrasi

Dialog Demokrasi merupakan bagian integral dari Habibie Democracy Forum dengan memfasilitasi ruang pertemuan dan pengkajian terkait nilai dan praktik demokrasi di Indonesia. Ruang yang dibangun dalam bentuk dialog bertujuan dapat menjadi sarana pertukaran pendapat, perspektif dan pengalaman, serta media advokasi dan membangun kesadaran publik terkait praktik dan nilai-nilai demokratis. Dialog Demokrasi menjadi ruang yang inklusif dengan melibatkan representasi dari unsur pemerintah, parlemen, organisasi non pemerintah atau masyarakat sipil, akademisi, masyarakat umum/asing, dan mahasiswa maupun pelajar.

For more publications please check our website:

www.habibiecenter.or.id

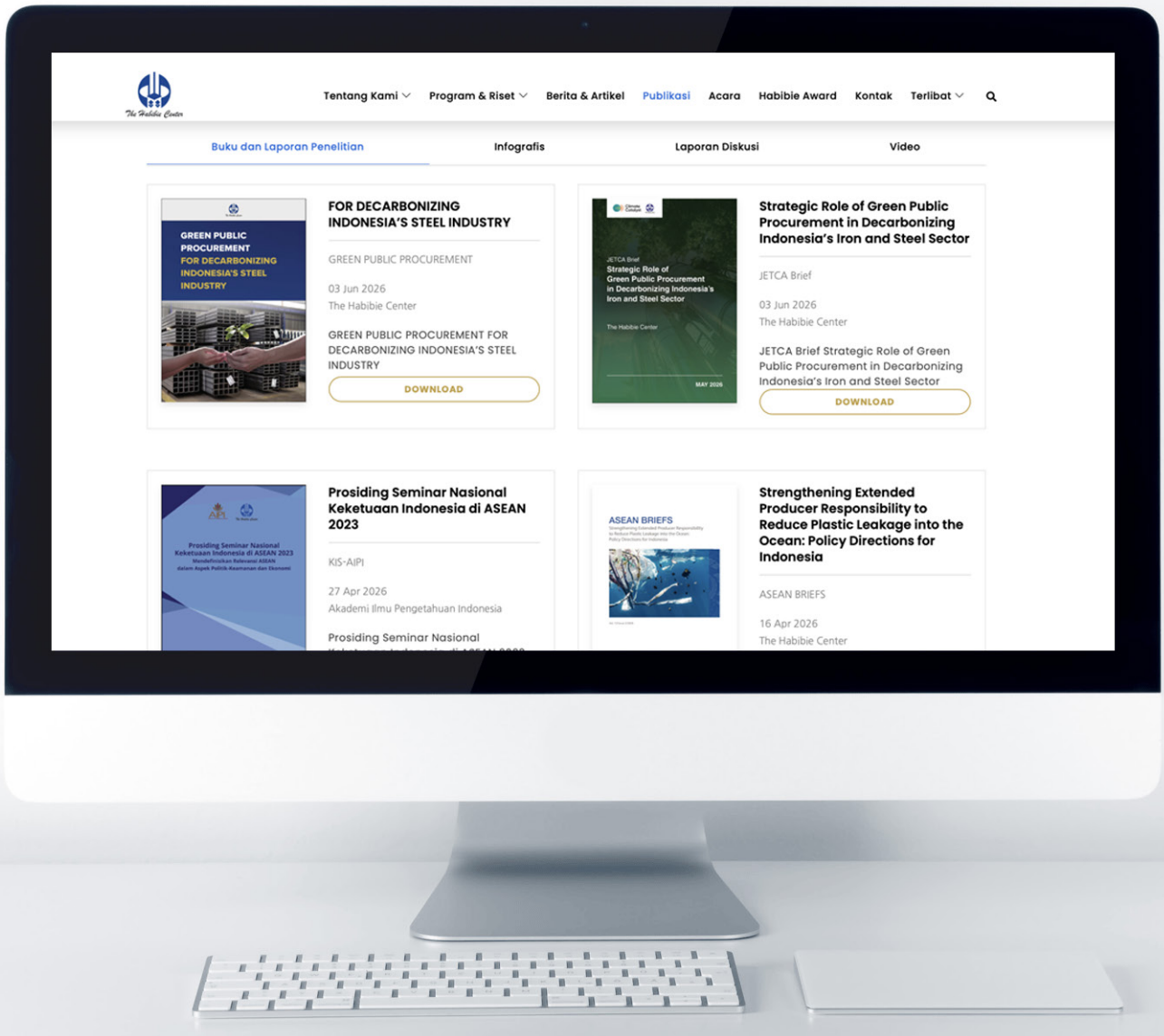

Subscribe to our YouTube channel:
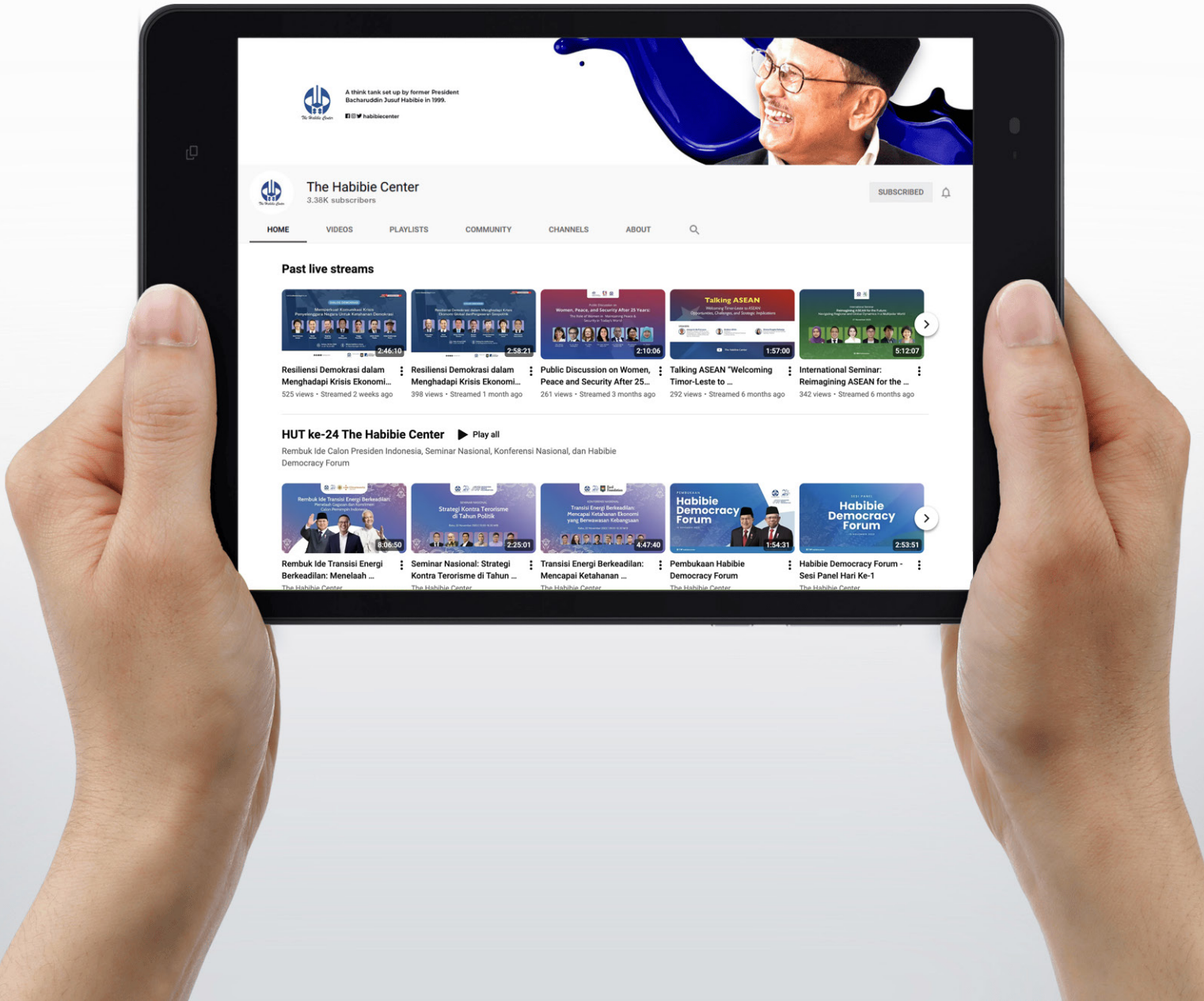
The Habibie Center